

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan

Afhani Fizi¹, Monica Rahardian Ary Helmina²

¹Mahasiswa Program Studi S2 Akutansi Universitas Lambung Mangkurat

²Dosen Program Studi S2 Akutansi Universitas Lambung Mangkurat

Email : afhanifizi2346@gmail.com

Abstract: *Corporate Governance is the principles known to protect business trust. The problem of developing good corporate governance practices coincided with the occurrence of financial cases involving several large companies such as Enron and WorldCom. This research aims to analyze the application of Good Corporate Governance (GCG) principles in company financial management. The data collection method used was a literature review. The literature used in this research is journals and articles related to Good Corporate Governance. The research results of the GCG principles applied are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. Where 1) the principle of transparency refers to openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company. 2) the principle of accountability refers to clarity of function, implementation and accountability so that company management is carried out effectively. 3) the principle of responsibility emphasizes the importance of conformity in company management to statutory regulations and healthy corporate principles. 4) the principle of independence, a situation where the company is managed professionally without conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with statutory regulations and healthy corporate principles. 5) The principle of fairness emphasizes the importance of fair and equal treatment of all Company stakeholders. The implication of this research is that companies must apply GCG principles in managing their companies to achieve long-term success.*

Keywords: *Good Corporate Governance*

Abstrak: *Tata Kelola Perusahaan ialah prinsip-prinsip yang diketahui guna melindungi kepercayaan bisnis. Masalah pengembangan praktik tata Kelola Perusahaan yang baik bersamaan dengan terjadinya kasus keuangan yang melibatkan beberapa Perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan Perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literatur review. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal maupun artikel yang terkait dengan Good Corporate Governance. Hasil penelitian prinsip-prinsip GCG yang diterapkan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Indendency dan Fairness. Dimana 1) prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2) prinsip akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3) prinsip responsibility menekankan pentingnya kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4) prinsip independency keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip*

korporasi yang sehat. 5) prinsip fairness menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan Perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan mereka untuk mencapai kesuksesan jangka Panjang.

Kata kunci: Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip GCG yang baik dan benar menjadi unsur utama dalam melaksanakan usaha yang ditujukan guna memaksimalkan nilai tambah untuk para pemegang saham dan menjaga kelangsungan usaha.

Transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran adalah lima pilar yang mendasari prinsip-prinsip GCG. Menurut Mahaendrayasa dan Putri (2017), kelima prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut : (1) transparansi mengacu pada komitmen Perusahaan untuk bersikap objektif dalam transaksi bisnisnya; (2) akuntabilitas mengacu pada komitmen Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (3) responsibility mengacu pada kewajiban Perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; (4) independensi mengacu pada komitmen Perusahaan untuk tidak terafiliasi dengan pihak luar manapun; dan (5) kewajaran mengacu pada komitmen perusahaan untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif.

Mundzir (2016) menyatakan aparat sebagai regulator harus memaksa Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan dan budaya Perusahaan sebagai satu kesatuan nilai yang harmonis.

Friendly (2017) menyatakan bahwa keberadaan sebuah Perusahaan mengindikasikan bahwa Perusahaan tersebut memiliki tujuan tertentu. Visi dan tujuan Perusahaan adalah deskripsi formal dan diartikulasikan tentang apa yang ingin dicapai oleh Perusahaan melalui operasinya. Dengan adanya struktur tata Kelola keuangan yang solid, semua tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat diwujudkan. Selain itu kolaborasi yang efektif antara semua karyawan dan manajemen puncak sangat penting. Menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam prosedur manajemen organisasi sangat penting untuk keberhasilan berkelanjutan dan memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan jika para pemimpinnya memahami ide-ide yang dapat diterapkan secara umum ini.

Gozali (2013) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam manajemen keuangan Perusahaan dapat membantu Perusahaan dalam menurunkan eksposur mereka terhadap risiko dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka Panjang.

Ardianingsih (2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan perusahaan erat kaitannya dengan masalah degradasi moral dikalangan pelaku bisnis, masih lemahnya atau tidak adanya sistem corporate governance yang baik serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik. Belum diterapkannya mekanisme GCG yang baik pada perusahaan, ini dapat menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi

akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan Herawaty, 2007). Penerapan GCG dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan (Tadjuddin, Anwar, & Hadijah, 2014)

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan Corporate Governance dengan sungguh-sungguh hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance (Kaihatu, 2006). Menurut (Iskander & Chamlou, 2000) krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya Corporate Governance di negara-negara ini, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan yang belum dilakukan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris dan terabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik (Wibowo, 2010) . Kendala pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi (Kaihatu, 2006).

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia melalui Kementrian BUMN mulai mengenalkan Good Corporate Governance melalui melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Hal tersebut didukung oleh pendapat Kaihatu (Kaihatu, 2006), yang menyatakan bahwa BUMN merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Penerapan GCG diperlukan agar disuatu perusahaan dikelola secara amanah, efisien, professional, dan tidak merugikan kepentingan stakeholders.

Mengelola keuangan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG adalah sesuatu yang sudah mulai dilakukan oleh banyak Perusahaan, namun masih banyak Perusahaan

yang belum memahami atau bahkan menyadari betapa pentingnya mengelola keuangan sesuai prinsip-prinsip tersebut (Hartanto, 2009).

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola Perusahaan. Diperkirakan Perusahaan akan lebih termotivasi untuk mengikuti prinsip-prinsip GCG dalam mengelola perusahaannya jika mereka diperlihatkan manfaat jangka Panjang dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, dan hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan manfaat-manfaat tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu, Cooper (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan kewajaran sangat penting untuk mencapai kesinambungan Perusahaan yang diiringi dengan pengakuan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola Perusahaan.

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip utama dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam hal pengelolaan keuangan Perusahaan. Transparansi mengacu pada kemampuan Perusahaan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup informasi keuangan, strategi Perusahaan, risiko, dan Tindakan yang dilakukan Perusahaan. Penerapan konsep transparansi dalam manajemen keuangan Perusahaan dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Kedua, transparansi dapat membantu organisasi untuk mengurangi risiko. Perusahaan harus mampu meramalkan dan menghadapi bahaya yang berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Perusahaan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang bahaya yang mereka hadapi dan mengambil Tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko ini dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka. Ketiga, transparansi dapat membantu Perusahaan dalam memenuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi standar peraturan dan hukum yang berlaku dalam lingkungan bisnis yang semakin diatur dan diregulasi. Perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku dan

mengambil Tindakan yang tepat untuk memenuhi persyaratan ini dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Keempat, transparansi dapat membantu Perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasi mereka. Dalam lingkungan bisnis yang semakin saling terhubung, citra dan reputasi Perusahaan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Perusahaan dapat membangun citra dan reputasi positif sebagai Perusahaan yang berintegritas dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Hal ini dapat membantu organisasi mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan utama dan meningkatkan posisi pasarnya.

Contoh tindakan nyata Perusahaan dalam penerapan prinsip transparansi ini adalah terbuka dalam pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami stakeholders, pengkomunikasian visi misi Perusahaan, kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders, tersedianya website Perusahaan dan adanya penetapan RUPS Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Penggunaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Perusahaan dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, dengan menunjukkan akuntabilitas atas Tindakan dan keputusannya, menunjukkan komitmennya untuk beroperasi dengan integritas dan etika yang baik. Hal ini dapat membantu bisnis dalam mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan utama seperti investor, karyawan dan pelanggan. Kedua, akuntabilitas dapat membantu Perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menghadapi bahaya-bahaya baru dalam lingkungan bisnis yang semakin rumit. Ketiga, akuntabilitas dapat membantu Perusahaan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi standar peraturan dan hukum yang berlaku dalam lingkungan bisnis yang semakin diatur dan diregulasi. Perusahaan dapat memperoleh kesadaran yang lebih baik akan risiko yang dihadapinya dan mengambil Tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut dengan meningkatkan akuntabilitasnya. Keempat, akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, organisasi harus dapat menunjukkan kinerja yang baik untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan dan memperoleh dukungan yang diperlukan. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mendapatkan kepercayaan dari investor dan pasar melalui penguatan akuntabilitas.

Contoh tindakan nyata Perusahaan dalam penerapan prinsip akuntabilitas ini adalah adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan Perusahaan dapat terlaksana secara efektif, adanya rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing jajaran dan dengan adanya aturan terkait ukuran kinerja untuk semua jajaran serta system reward and punishment.

3. Responsibility

Prinsip ketiga adalah responsibility, prinsip ini menggarisbawahi perlunya Perusahaan bertanggungjawab atas konsekuensi dari keputusan dan aktivitas bisnis mereka. Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan semua

pemangku kepentingan. Perusahaan harus memahami implikasi dari setiap keputusan yang mereka ambil dan menerima tanggungjawab atas Tindakan mereka dengan menggunakan prinsip tanggungjawab. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan Perusahaan, tetapi juga menghormati hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan. Perusahaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan ketika menjalankan bisnis. Manfaat penerapan prinsip responsibility bagi Perusahaan adalah pertama, Perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dengan menunjukkan bahwa Perusahaan bertanggungjawab atas aktivitas dan keputusannya, Perusahaan dapat membangun citra yang baik sebagai Perusahaan yang peduli terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan. Kedua, menerapkan gagasan akuntabilitas dapat membantu bisnis mengurangi risiko reputasi. Reputasi perusahaan sangat penting dalam memperoleh kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu dunia bisnis yang semakin terhubung. Dengan membuktikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kegiatannya dan pengambilan keputusan, hal ini dapat mengurangi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi posisi pasar perusahaan. Ketiga, penerapan konsep akuntabilitas dapat membantu bisnis dalam mencapai tujuan jangka panjang keberlanjutan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi ketika menjalankan bisnis di dunia yang semakin terhubung dan diatur. Perusahaan dapat memastikan bahwa operasi mereka berkelanjutan dan tidak membahayakan lingkungan atau komunitas local mengambil tindakan yang bertanggung jawab.

Contoh tindakan nyata Perusahaan dalam penerapan prinsip responsibility ini adalah Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap Masyarakat, lingkungan dan pemerintah, seperti peduli terhadap Masyarakat, peduli terhadap kelestarian lingkungan, serta melaksanakan kewajiban pajak dan memberikan hak karyawan.

4. Independensi

Prinsip keempat Good Corporate Governance (GCG) adalah independensi atau kemandirian. Prinsip ini menyoroti perlunya independensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan manajemen keuangan. Artinya keputusan harus diambil secara obyektif dan tanpa memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan diambil oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kemandirian dengan menggunakan prinsip independensi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tidak mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Orang yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan harus kompeten dan berkualitas untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Penggunaan konsep independensi dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, dapat membantu bisnis membuat penilaian yang lebih obyektif dan masuk akal. Seringkali terjadi konflik kepentingan antara orang-orang yang terlibat saat membuat keputusan. Perusahaan yang memprioritaskan kemandirian dapat mengambil keputusan yang lebih obyektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan atau kepentingan pribadi kelompok tertentu. Kedua, penerapan prinsip independensi dapat membantu bisnis mengurangi risiko penipuan dan

kecurangan. Risiko penipuan dan kecurangan cukup signifikan dalam dunia bisnis yang semakin rumit lingkungan bisnis. Perusahaan yang mengutamakan independensi dapat menghindari konflik kepentingan dan penipuan yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Ketiga, penerapan prinsip independensi dapat membantu dunia usaha memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam bisnis, kepercayaan sangat penting untuk mengembangkan hubungan positif dengan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Korporasi dapat mengembangkan citra positif sebagai perusahaan yang jujur dan perusahaan yang beretika dengan menunjukkan bahwa mereka mengutamakan independensi dalam pengambilan keputusan

Contoh tindakan nyata Perusahaan dalam penerapan prinsip independency ini adalah Perusahaan dikelola secara independent tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fairness

Fairness atau Keadilan, Kewajaran atau ketidakberpihakan merupakan prinsip kelima dan terakhir dari Good Corporate Governance (GCG), Prinsip ini menempatkan sebuah penekanan pada pentingnya memperlakukan semua pemangku kepentingan perusahaan secara adil dan setara, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Dalam menggunakan asas keadilan, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan hal kebijakan dan prosedur yang diterapkan mampu memberikan keuntungan yang merata bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, dunia usaha mempunyai kewajiban untuk menahan diri dari prasangka dan memastikan semua pihak menerima perlakuan yang sama. Penerapan prinsip keadilan dapat memberikan banyak dampak positif untuk bisnis. Pertama, penerapan pada prinsip ini dapat memfasilitasi pengembangan hal-hal positif antara dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan harus mampu menjaga hubungan dengan banyak pemangku kepentingan yang bereputasi baik agar dapat berkembang dalam iklim bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Bisnis memiliki kemampuan untuk membina hubungan dengan konsumen. Kedua, menerapkan prinsip keadilan dapat membantu Perusahaan meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai, karena mereka merasa dihargai dan diakui dalam lingkungan kerja yang dianggap adil. Ketiga, penerapan prinsip keadilan dapat membantu dunia usaha mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha apa pun. Perusahaan perlu mampu mengembangkan citra positif diri sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab untuk berhasil dalam iklim bisnis yang semakin kompleks saat ini. Ada kemungkinan bagi suatu bisnis untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat jika masyarakat dapat menunjukkan bahwa masyarakat mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam segala hal operasi, kebijakan, dan prosedurnya. Keempat, penerapan prinsip keadilan dapat membantu dunia usaha upaya mereka mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan harus mampu dengan cepat dan beradaptasi secara efisien untuk berkembang dalam iklim bisnis yang menjadi semakin kompleks dan tidak stabil. Perusahaan mampu menggalang dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan

berkelanjutan dalam jangka panjang, jika keadilan menjadi prioritas utama kebijakan dan prosedur mereka.

Contoh tindakan nyata Perusahaan dalam penerapan prinsip fairness ini adalah Perusahaan memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepada Perusahaan, serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Transparansi:** Prinsip ini mencakup kemampuan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan. Transparansi meningkatkan kepercayaan, membantu mengurangi risiko, memastikan kepatuhan hukum, dan memperbaiki citra perusahaan.
2. **Akuntabilitas:** Akuntabilitas menekankan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Hal ini mendukung integritas, pengambilan keputusan yang lebih baik, kepatuhan hukum, dan kinerja keuangan yang lebih baik.
3. **Responsibility:** Prinsip responsibility menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap konsekuensi keputusan dan aktivitas bisnis mereka. Ini memungkinkan perusahaan membangun kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko reputasi, dan mencapai tujuan berkelanjutan.
4. **Independensi:** Independensi dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk keputusan yang obyektif dan pengurangan risiko konflik kepentingan. Ini membantu dalam penilaian obyektif, mengurangi risiko penipuan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.
5. **Fairness:** Prinsip fairness menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Ini dapat memfasilitasi hubungan positif, meningkatkan motivasi karyawan, memperoleh kepercayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanudin. (2023). Menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Sean Institute*. I(02)
- Rahmat. A. (2013). Good Corporate Governance (GCG) sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Mahasiswa FEB*
- Illabillah. V. R. (2022). Keterkaitan Antara Transparansi dengan Sifat Tabligh dalam Penerapan Prinsip GCG. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(3). 893-898
- Sabrina. N. N. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. I(2)

Suwandi. I. (2019). Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Umum Pelayanan Publik*. 2(1)